

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali diganti merupakan salah satu landasan yuridis utama bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Arahan dan tujuan yang diberikan oleh undang-undang tersebut sudah sangat baik. Akan tetapi, benarkah undang-undang tersebut dapat mewujudkan pemerintahan daerah otonom yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel secara berkesinambungan? Jawabannya tergantung pada formula atau rumusan yang diberikan oleh peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya. Salah satu aspek pemerintah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Anggaran daerah berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang, setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang (Mardiasmo, 2018). Anggaran daerah (APBD) diharapkan mampu memainkan perannya sebagai instrument kebijakan dan instrument manajemen bagi pemerintah daerah. APBD dalam

era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja, anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau input yang di tetapkan. Dalam pelaksanaan anggaran harus tetap menekankan pada prinsip ekonomis, efisien, dan efektif, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan hasil.

Proses penyusunan anggaran daerah ini pemerintah harus mampu melihat potensi yang dimiliki daerah nya, sehingga mampu mengalokasikan anggarannya dengan tepat. Dalam hal ini potensi yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif (Hidayat, 2013).

Anggaran daerah disusun untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Untuk memberi dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat daerah, seharusnya anggaran daerah diutamakan untuk biaya pembangunan daerah dari pada kegiatan operasional pemerintah daerah. Pengalokasian anggaran belanja untuk pembangunan daerah biasanya dilakukan setelah alokasi untuk kegiatan operasional terpenuhi, sehingga kapasitas fiskal yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan sangat tergantung terhadap besar kecilnya kebutuhan operasional.

Besar anggaran daerah yang digunakan untuk belanja modal dapat dilihat dari rasio belanja modal terhadap total belanja daerah. Belanja modal ini akan mempengaruhi neraca pemerintah daerah yaitu dengan bertambahnya aset daerah. Diharapkan dengan peningkatan pengalokasian pada belanja modal pemerintah daerah dapat meningkatkan pembangunan daerahnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berhasil merealisasikan 101,3% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 17,04 triliun pada 2016. Jumlah tersebut terdiri atas pajak daerah Rp 15 triliun, retribusi daerah Rp 73 juta, laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 332 juta, serta sumber PAD lainnya sebesar Rp 919 juta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sejak 2013, ekonomi Jawa Barat menunjukkan tren pertumbuhan. Salah satu indikatornya tercermin PAD provinsi di Tanah Pasundan tersebut yang terus naik dari Rp 12,4 triliun menjadi Rp 17,04 triliun pada 2016. Namun, Pemprov Jawa Barat hanya menargetkan PAD sebesar Rp 16,52 triliun pada 2017, turun 3,04% dari realisasi tahun sebelumnya. Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah provinsi cenderung menurun dari 67,4% pada 2014 menjadi hanya 61,54% pada 2016. Ini mengindikasikan bahwa kemandirian pengelolaan anggaran keuangan Jawa Barat yang berasal dari pendapatan asli daerah semakin berkurang.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, pemerintah pusat terus menghimbau pemerintah daerah agar presentasi belanja modal ditingkatkan sebesar 30 persen. Penambahan presentasi itu tidak sulit karena dilaksanakan secara

bertahap saat ini sudah ada beberapa daerah yang telah mencapai 30 persen. Menurut Mendagri (Fauzi Gunawan, 2013) kalau ada efisiensi, baik dari dan perjalanan dinas, maupun dalam belanja pegawai maka dana ini bisa dialihkan untuk belanja modal, kalau belanja pegawai dapat diturunkan, maka APBD akan semakin sehat. Cara menambah alokasi belanja modal ialah berhemat dalam belanja pegawai dan belanja barang. Belanja pegawai ditekan dengan tidak merekrut pegawai baru kecuali guru dokter, dan perawat. Belanja barang dihemat dengan mengurangi perjalanan dinas yang tidak perlu.

Mayoritas dana transfer daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemda digunakan untuk mensejahterakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu terlihat dari data yang diformulasi oleh *Institute for Development of Economic and Finance (Indef)* bahwa pada tahun 2013, rata-rata belanja pegawai untuk pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 49 persen. Padahal rata-rata belanja modal hanya 25,3 persen.

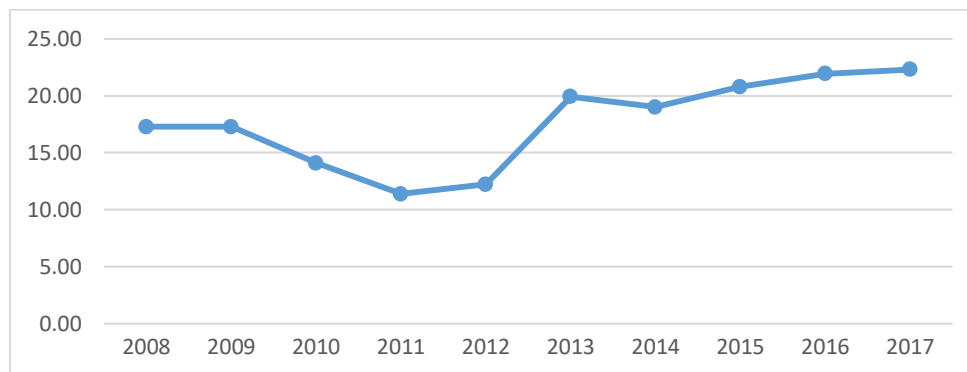
Kenyataan tersebut mengkhawatirkan, karena mengidentifikasikan bahwa dana transfer daerah yang jumlahnya terus meningkat tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan karena habis untuk belanja pegawai. Dengan kata lain peningkatan dana transfer ternyata belum mampu mengurangi ketimpangan yang ada.

Sebetulnya pemasukan Pemda tidak hanya dari dana transfer Pemerintah Pusat, tetapi juga dari Pendapatan Asli Daerah, diantaranya adalah Retribusi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum. Tapi masalah sangat klasik, yaitu BUMD yang tidak efisien, malah sering harus nombok. Sedangkan retribusi sudah

mulai dipangkas karena menghambat investasi. Sementara BLU *urgensinya* ke pelayanan, sehingga *income*-nya kecil.

Dilihat dari data Realisasi APBD yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2017, Kota Tasikmalaya termasuk yang belum bisa meningkatkan kemampuan belanja modalnya.

Gambar 1.1
Rasio Realisasi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah
Tahun 2008 sampai dengan tahun 2017



Dari data diatas rata-rata peresentase belanja modal Kota Tasikmalaya sebesar 18,2 persen masih jauh untuk mencapai 30 persen.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. *Pertama*, Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan

efektivitas organisasi sektor publik dalam memberi pelayanan publik. *Kedua*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat di ukur dengan berbagai analisis rasio keuangan. Rasio keuangan tersebut dapat dilihat dari data keuangan yang bersumber dari APBD, adapun beberapa pengukuran yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah diantaranya adalah : rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektifitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio tingkat pembiayaan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), rasio ruang fiskal, rasio efisiensi, dan rasio kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang telah melakukan penelitian terkait Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Kudhori Dosen Akademi Manajemen Koperasi Tantular Madiun dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). Penelitiannya ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara kinerja pemerintah daerah yang diprosikan dengan derajat desentralisasi, efektifitas pendapatan asli daerah dan kemandirian keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal di pemerintah

daerah kabupaten/kota seluruh provinsi Jawa Timur pada tahun 2012. Berdasarkan hasil uji empiris yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Derajat desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Hampir 70% rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah berada pada kisaran kurang dari 10%. Hal ini menunjukkan kontribusi PAD yang kecil terhadap total pendapatan daerah, namun dalam penelitian ini bisa mempengaruhi terhadap alokasi belanja modal, dimana hal ini dimungkinkan karena adanya masalah keagenan antara pihak eksekutif, yaitu pemerintah daerah dan pihak legislatif atas alokasi belanja modal. Efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila mencapai minimal 1 atau 100%. Dilihat dari rasio efektivitas PAD, 99% berada di atas 100%, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur sudah bisa memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan, sehingga bisa mempengaruhi dan mengalokasikan sebagian PAD-nya untuk belanja modal. Kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Semakin tinggi pendapatan asli daerah mencerminkan semakin tingginya tingkat kemandirian daerah tersebut, sehingga tidak selalu tergantung kepada dana bantuan berupa transfer, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk menjalankan pemerintahannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Elliya Agus (Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Merangi), dan Muhammad Safri (Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi) dengan judul penelitian Kinerja Keuangan Daerah dan Pembiayaan Belanja Modal Kabupaten Merangin. Penelitiannya ini bertujuan untuk mengetahui kinerja anggaran keuangan daerah Kabupaten Merangin menggunakan pendekatan rasio keuangan untuk mengukur derajat desentralisasi, tingkat efisiensi dan efektifitas keuangan daerah, serta mengetahui, menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh langsung komponen kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap alokasi belanja modal Kabupaten Merangin tahun 2001-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi masih sangat rendah dimana rata-rata selama 15 tahun hanya sebesar 5,16 % yang termasuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merangin masih belum berpengaruh besar terhadap pendapatan daerah, dilihat dari efektifitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin sudah sangat efektif dan efisien. Hasil dari regresi linear berganda dengan variabel derajat otonomi fiskal, efektifitas dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Kinerja keuangan maka Belanja Modal juga akan ikut naik.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Indra Praza dari Universitas Jambi pada tahun 2016 dengan judul “Analisi Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja

Modal di Provinsi Jambi”. Penelitiannya ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan baik secara simultan maupun secara parsial terhadap alokasi belanja modal. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel yang terdiri dari data time series yaitu data tahun 2010 – tahun 2013 dan data cross section yaitu data 9 (sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota yang berada di Provinsi Jambi. Metode analisis yaitu analisis regresi data panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masih tergolong rendah. Hasil regresi data panel dengan menggunakan metode Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan bahwa kinerja keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan secara parsial Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Rasio Ketergantungan Keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan dan Rasio Derajat Kontribusi BUMD berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Rasio Efektifitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Marlina, Mirna Indriani, dan Heru Fahlevi dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada tahun 2017 dengan judul “Kinerja Keuangan dan Alokasi Belanja Modal” . Penelitiannya ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan (berupa derajat desentralisasi, ketergantungan daerah,

kemandirian keuangan, efektivitas PAD) terhadap alokasi belanja modal. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 23 pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan periode pengamatan 5 tahun (2010-2014). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan model data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kinerja keuangan (berupa dari derajat desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian keuangan, efektivitas PAD) secara bersama-sama berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, (2) kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, (3) kinerja keuangan berupa ketergantungan daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, (4) kinerja keuangan berupa kemandirian keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, (5) kinerja keuangan berupa efektivitas PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Martini dan A.A.N.B Dwirandra dari Universitas Udayana (Unud) pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali” yang melatar belakangi penelitiannya adalah kinerja keuangan daerah diduga tidak berbanding lurus pada alokasi belanja modal, padahal belanja modal memiliki kemampuan untuk mengakselerasi perekonomian daerah. Hal ini dilihat dari riset empiris dan data absolut yang menyebutkan proporsi belanja modal secara nasional dibawah 25 persen. Tujuan penelitiannya ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja

keuangan daerah pada alokasi belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang terdiri dari rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio efektivitas PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal, rasio tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, dan rasio kontribusi BUMD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Desak Nyoman Yulia Astiti, dan Ni Putu Sri Harta Mimba dari Universitas Udayana (Unud) pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh belanja Rutin dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan pemerintah Daerah”. Penelitiannya ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitiannya dilakukan di Provinsi Bali dengan lingkup delapan kabupaten dan satu kota dalam rentang waktu lima tahun yaitu tahun 2009-2013. Sumber data penelitian yaitu berupa data sekunder dari Biro Keuangan Provinsi Bali. Hipotesis diuji dalam penelitian ini dengan menggunakan *Partial Least Square* (PLS). Berdasarkan hasil analisis, diperoleh hasil belanja rutin tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah dan belanja modal berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel independensi, belanja rutin dan belanja modal mampu

memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 22,3%, sedangkan sisanya 77,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Deni Indriyanti dan Henny Rahyuda dari Universitas Udayana (Unud) pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali”. Penelitiannya ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal. Penelitiannya ini dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali periode tahun 2012-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio derajat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah, tingkat pembiayaan SiLPA, dan derajat kontribusi BUMD berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sementara itu, kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Asepma Hygi Prihastuti, Taufeni Taufik, dan Restu Agusti dari Universitas Riau pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau” yang melatar belakangi penelitiannya ini adalah bahwa kemajuan suatu daerah dapat ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, di mana salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah

investasi, indikatornya adalah belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pengeluaran modal juga dipengaruhi bagaimana dengan kinerja keuangannya. Penelitiannya ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh alokasi dampak kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Metode analisis data menggunakan Path Analysis with Partial Least Square (PLS) Program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan mempengaruhi alokasi belanja modal, alokasi belanja modal tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kinerja keuangan secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh kinerja keuangan secara tidak langsung.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Armaja, Ridwan Ibrahim, dan Ali Amin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dan Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, dengan judul Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. Penelitiannya ini bertujuan untuk menguji pengaruh kekayaan daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah baik secara bersama-sama maupun secara terpisah terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2011-2015 yang berjumlah 23 Kabupaten/Kota sehingga jumlah pengamatan sebanyak 115 pengamatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota-Perubahan

(APBK-P) 23 Kabupaten/Kota di Aceh periode 2011-2015. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data sekunder. Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan daerah, Dana Perimbangan, dan belanja daerah baik secara bersama-sama maupun secara terpisah berpengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Ayu Delima, Taufiq Marwa, Anna Yulianita, Universitas Sriwijaya, dengan judul penelitian Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik Di Sumatera Bagian Selatan. Hasil dari penelitiannya ini adalah berdasarkan persamaan hasil regresi di atas dapat dianalisis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap dependen. Rasio kemandirian (RK) berpengaruh negatif terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi rasio kemandirian yaitu sebesar $-0,017345$. Artinya setiap kenaikan rasio kemandirian sebesar 1% maka belanja modal untuk pelayanan publik akan turun sebesar $0,017345\%$. Rasio efektifitas (RE) berpengaruh negatif terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi rasio efektifitas yaitu sebesar $-0,003958$. Artinya setiap kenaikan rasio efektifitas sebesar 1% maka belanja modal untuk pelayanan publik akan turun sebesar $0,003958\%$. Rasio efisiensi (RF) berpengaruh negatif terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi rasio

kemandirian yaitu sebesar $-0,008520$. Artinya setiap kenaikan rasio efisiensi sebesar 1% maka belanja modal untuk pelayanan publik akan turun sebesar $0,008520\%$. Nilai rata-rata dari komponen kesalahan random (*random error component*) sebesar 14.89037.

11. Penelitian yang dilakukan oleh D Kartika IC Kusuma dari Progam Studi Akuntansi Universitas Djuanda Bogor dengan judul penelitian Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas dan Rasio Efisiensi Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi. Penelitiannya ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Kabupaten Sukabumi dengan menganalisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Realisasi APBD Kabupaten Sukabumi. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2009-2013. Analisis data menggunakan metode statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian Kabupaten Sukabumi dari tahun anggaran 2009-2013 rata-rata hanya sebesar $8,15\%$ yang tergolong sangat rendah dengan menunjukkan pola hubungan instruktif. Rasio efektivitas PAD Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2009-2013 rata-rata tingkat pencapaiannya sebesar $105,67\%$ dari anggaran yang ditetapkan yang tergolong sangat efektif. Kinerja keuangan Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2009-2013 berdasarkan rasio efisiensi PAD tergolong sangat efisien dengan rata-rata setiap tahunnya sebesar $5,02\%$.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Sylvia Febriany Gerungan, David P.E Saerang, dan Winston Pontoh, dengan judul yang diambil “Pengaruh Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Sulawesi Utara”. Tujuan dari penelitiannya ini adalah untuk mengetahui pengaruh regional kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal pada tahun-tahun ke depan kabupaten / kota Utara Sulawesi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitiannya ini adalah regresi. Hasilnya menunjukkan bahwa, secara bersamaan, rasio Kemerdekaan Keuangan Daerah, rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Lokal Rasio Efektivitas Pendapatan Asli, rasio Efektivitas Belanja Modal, rasio Efisiensi, dan Rasio Harmoni Pengeluaran berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Pengeluaran Modal. Sebagian Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan rasio Efisiensi, secara signifikan, memiliki pengaruh negatif terhadap Alokasi Pengeluaran Modal. Sementara, rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Keharmonisan Pengeluaran memiliki pengaruh positif terhadap Alokasi Pengeluaran Modal. Itu Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan Efektivitas Belanja Modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan menuju Alokasi Pengeluaran Modal.
13. Penelitian yang dilakukan oleh Yanuar Fahd, dan Syarifuddin Rasyid dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2017 dengan judul yang diambil “Pengaruh kinerja Keuangan daerah terhadap Alokasi Belanja Modal dan Implikasinya Pada Tingkat Kmisinan Dan Pengangguran”. Penelitiannya ini bertujuan untuk menguji

pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal dan implikasinya pada tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran studi data panel pada pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan metode analisis jalur (path analysis) yang diolah dengan menggunakan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS v.20). Analisis SPSS menunjukkan nilai koefisien determinasi sama dengan 0,461 yang berarti bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model tersebut adalah 46,1 % sedangkan sisanya 53,9 % oleh variabel lain yang belum terdapat pada model. Hasil penelitian menunjukkan pada uji pengaruh langsung efektifitas PAD dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Alokasi belanja modal berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan namun tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Untuk analisis uji pengaruh tidak langsung menunjukkan satu dari tiga indikator kinerja keuangan yaitu efektifitas PAD secara tidak langsung berpengaruh pada tingkat kemiskinan melalui alokasi belanja modal namun tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan indikator kinerja keuangan lainnya yaitu kemandirian keuangan daerah dan efisiensi keuangan daerah secara tidak langsung tidak berpengaruh pada tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui alokasi belanja modal.

14. Penelitian yang dilakukan oleh Havid Sularso, dan Yanuar E. Restianto dari Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2011 dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah”. Tujuan dari penelitiannya ini adalah untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Metode analisis data yang digunakan adalah *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan bantuan program *Analysis of Moment Structures* (AMOS). Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa alokasi belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan, alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah harus senantiasa meningkatkan kinerja keuangannya karena berdampak pada peningkatan belanja modal, sehingga harus mendapatkan prioritas yang memadai.
15. Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Marlina dari Universitas Teuku Umar dengan judul yang diambil adalah “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Dan *Budget Ratcheting* Terhadap Alokasi Belanja Modal”. Penelitiannya ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan dan budget ratcheting terhadap alokasi belanja modal. Kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini diukur dari derajat desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian keuangan, dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini

adalah 23 pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan periode pengamatan 5 tahun (2010-2014). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan model data panel. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah (derajat desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian keuangan, dan efektivitas PAD) dan *budget ratcheting* berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa: (1) kinerja keuangan daerah berupa derajat desentralisasi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, (2) kinerja keuangan daerah berupa ketergantungan daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, (3) kinerja keuangan daerah berupa kemandirian keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, (4) kinerja keuangan daerah berupa efektivitas PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, (5) *budget ratcheting* berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	2	3	4	5	6
1	Ahmad Kudhori, 2015: Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur)	Variabel yang diteliti adalah kinerja keuangan pemerintah daerah dan alokasi belanja modal	Indikator kinerja keuangan hanya pada kemandirian keuangan dan efektivitas pendapatan asli daerah	Derajat desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal Dilihat dari rasio efektivitas PAD, 99% berada di atas 100%, hal ini menunjukkan	Ekomaks, Volume 4 No. 1 Maret 2015

				<p>bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur sudah bisa memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan, sehingga bisa mempengaruhi dan mengalokasikan sebagian PAD-nya untuk belanja modal Kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.</p>	
2	<p>Eliya Agus dan Muhammad Safri, 2016: Kinerja Keuangan Daerah dan Pembiayaan Belanja Modal Kabupaten Merangin</p>	<p>Variabel yang diteliti adalah kinerja keuangan pemerintah daerah dan alokasi belanja modal</p>	<p>Indikator kinerja keuangan hanya pada kemandirian keuangan dan efektifitas pendapatan asli daerah</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi masih sangat rendah dimana rata-rata selama 15 tahun hanya sebesar 5,16 % yang termasuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merangin masih belum berpengaruh besar terhadap pendapatan daerah, dilihat dari efektifitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin sudah</p>	<p>ISSN: 2338-4603 Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 4 No. 1, Juli-September 2016</p>

					sangat efektif dan efisien.
3	Eko Indra Praza, 2016: Analisi Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi	Variabel yang diteliti adalah kinerja keuangan pemerintah daerah dan alokasi belanja modal	Indikator kinerja keuangan hanya pada kemandirian keuangan dan efektifitas pendapatan asli daerah	Rasio Ketergantungan Keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan dan Rasio Derajat Kontribusi BUMD berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Rasio Efektifitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.	ISSN: 2338-4603 Jurnal perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol. 4 No.1, Juli-September 2016 Universitas Negeri Jambi
4	Lilis Marlina, Mirna Indriani, dan Heru Fahlevi, 2017: Kinerja Keuangan dan Alokasi Belanja Modal	Variabel yang diteliti adalah kinerja keuangan pemerintah daerah dan alokasi belanja modal	Indikator kinerja keuangan hanya pada kemandirian keuangan dan efektifitas pendapatan asli daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan (berupa derajat desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian keuangan, efektivitas PAD) secara bersama-sama berpengaruh terhadap alokasi belanja modal	ISSN: 2302-0164 Jurnal Akuntansi, Vol. 6, No. 1, Februari 2017 Universitas Syiah Kuala
5	Kadek Martini dan A.A.N.B Dwirandra, 2015: Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali	Variabel yang diteliti adalah kinerja keuangan pemerintah daerah dan alokasi belanja modal	Indikator kinerja keuangan hanya pada kemandirian keuangan dan efektifitas pendapatan asli daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang terdiri dari rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio efektivitas PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal, rasio tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh negatif	ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi, Vol. 10, No. 2, 2015 Universitas Udayana

				dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, dan rasio kontribusi BUMD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal.	
6	Desak Nyoman Yulia Astiti, dan Ni Putu Sri Harta Mimba, 2016: Pengeruh Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan pemerintah Daerah	Variabel yang diteliti adalah kinerja keuangan pemerintah daerah	Kinerja Keuangan sebagai variabel dependen	Hasil analisis, diperoleh hasil belanja rutin tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah dan belanja modal berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah	ISSN: 2302-8559 E-Jurnal, Vol. 13, No. 3, 2016 Universitas Udayana
7	Ni Made Deni Indriyanti dan Henny Rahyuda, 2018: Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Aloksi Belanja Modal di Provinsi Bali	Variabel yang diteliti adalah kinerja keuangan pemerintah daerah dan alokasi belanja modal	Indikator kinerja keuangan hanya pada kemandirian keuangan dan efektifitas pendapatan asli daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio derajat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah, tingkat pembiayaan SiLPA, dan derajat kontribusi BUMD berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sementara itu, kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), dan	ISSN: 2302-8912 E-Jurnal, Vol. 7, No. 9, 2018 Universitas Udayana

				efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal.	
8	Asepma Hygi Prihastuti, Taufeni Taufik, dan Restu Agusti, 2015: Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau	Variabel yang diteliti adalah kinerja keuangan pemerintah daerah dan alokasi belanja modal	Tidak meneliti pertumbuhan ekonomi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan mempengaruhi alokasi belanja modal,	Jurnal Sorot, Vol. 10, No. 2, Oktober 2015 Universitas Riau
9	Armaja, Ridwan Ibrahim, dan Ali Amin, 2015: Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan.	Variabel yang diteliti adalah kinerja keuangan pemerintah daerah	Tidak meneliti dana perimbangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan daerah, Dana Perimbangan, dan belanja daerah baik secara bersama-sama maupun secara terpisah berpengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh.	ISSN. 2502-6976 Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 3 Nomor 2, September 2015
10	Nadya Ayu Delima, Taufiq Marwa, dan Anna Yulianita, 2016: Kinerja Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Peayanan Publik di Sumatera Bagian Selatan	Variabel yang diteliti adalah kinerja keuangan pemerintah daerah dan alokasi belanja modal	Indikator kinerja keuangan hanya pada kemandirian keuangan dan efektifitas pendapatan asli daerah	Rasio kemandirian (RK) berpengaruh negatif terhadap belanja modal untuk pelayanan publik Rasio efektifitas (RE) berpengaruh negatif terhadap belanja modal untuk pelayanan publik Rasio efisiensi (RF) berpengaruh negatif terhadap terhadap	p-ISSN: 1829-5843 Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 14 (2): 69-78, Desember 2016

				belanja modal untuk pelayanan publik	
11	D Kartika IC Kusuma, 2105: Analisi Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas dan Rasio Efisiensi Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi	Variabel yang diteliti adalah kinerja keuangan pemerintah daerah dan alokasi belanja modal	Indikator kinerja keuangan hanya pada kemandirian keuangan dan efektifitas pendapatan asli daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian Kabupaten Sukabumi dari tahun anggaran 2009-2013 rata-rata hanya sebesar 8,15% yang tergolong sangat rendah dengan menunjukkan pola hubungan instruktif. Rasio efektivitas PAD Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2009-2013 rata-rata tingkat pencapaiannya sebesar 105,67% dari anggaran yang ditetapkan yang tergolong sangat efektif	ISSN 2442-3033 JURNAL AKUNIDA Volume 1 Nomor 2, Desember 2015
12	Sylvia Febriny Gerungan, David P.E Saerang, dan Winston Pontoh, 2015: Pengaruh Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Sulawesi Utara	Variabel yang diteliti adalah kinerja keuangan pemerintah daerah dan alokasi belanja modal	Indikator kinerja keuangan hanya pada kemandirian keuangan dan efektifitas pendapatan asli daerah	Hasilnya menunjukkan bahwa, secara bersamaan, rasio Kemerdekaan Keuangan Daerah, rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Lokal Rasio Efektivitas Pendapatan Asli, rasio Efektivitas Belanja Modal, rasio Efisiensi, dan Rasio Harmoni Pengeluaran berpengaruh signifikan terhadap	Jurnal dipublikasi oleh media.neliti.com Universitas Sam Ratulangi

				Alokasi Pengeluaran Modal.	
13	Yanuar Fahd, dan Syarifuddin Rasyid dari, 2017: Pengaruh kinerja Keuangan daerah terhadap Alokasi Belanja Modal dan Implikasinya Pada Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Variabel yang diteliti adalah kinerja keuangan pemerintah daerah dan alokasi belanja modal	Tidal meneliti bentuk implikasi pada tingkat kemiskinan dan pengangguran	Hasil penelitian menunjukkan pada uji pengaruh langsung PAD dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.	ISSN : 2303-100X, Jurnal Analisis, Vol. 6, No. 2, Desember 2017
14	Havid Sularso, dan Yanuar E. Restianto, 2012: Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah	Variabel yang diteliti adalah kinerja keuangan pemerintah daerah dan alokasi belanja modal	Tidal meneliti pertumbuhan ekonomi	Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa alokasi belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan, alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah	ISSN:2088-2106, Media Riset Akuntansi, Vol. 1, No. 2, Agustus 2011 Universitas Jedral Soedirman
15	Lilis Marlina, 2018: Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Dan <i>Budget Ratcheting</i> Terhadap Alokasi Belanja Modal	Variabel yang diteliti adalah kinerja keuangan pemerintah daerah dan alokasi belanja modal	Tidal meneliti <i>Budget Ratcheting</i>	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa: (1)kinerja keuangan daerah berupa derajat desentralisasi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, (2) kinerja keuangan daerah berupa ketergantungan daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, (3) kinerja keuangan	Jurnal Akbis, Vol. 2, No. 2, 2018 Universitas Teuku Umar

daerah berupa kemandirian keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, (4) kinerja keuangan daerah berupa efektivitas PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, (5) *budget ratcheting* berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

- 16 Fiqri Firmansyah (2019):** “Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Kota (Survey Pada 6 (Enam) Daerah Kabupaten/Kota di Periangen Timur”
-

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Alokasi Belanja Modal pada daerah Kabupaten/Kota di Periangen Timur tahun 2008-2017
2. Bagaimana Kemandirian Keuangan Daerah, dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Alokasi Belanja Modal

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Alokasi Belanja Modal
2. Untuk mengetahui pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada Alokasi Belanja Modal.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi di Universitas Siliwangi Tasikmalaya serta sebagai tambahan pengetahuan atas apa yang telah diteliti.

2. Bagi Intansi Pemerintahan

Untuk menilai kinerja keuangan Pemerintahan Daerah dalam menerapkan Otonomi Daerah dan sebagai bentuk motivasi untuk terus meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah dan sebagai bentuk evaluasi kinerja Pemerintah Daerah.

3. Bagi Pihak Luar

Untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menilai kinerja dari pemerintah daerahnya dan untuk meningkatkan kepekaan masyarakat atau publik terhadap dana publik (*public money*) yang dikelola Pemerintah Daerah untuk pengembangan daerahnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan dengan menggunakan data laporan keuangan tahun 2008 sampai tahun 2017 pada daerah Kabupaten/Kota Di Periangnan Timur, dimana data yang diolah merupakan data resmi yang dirilis oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) melalui www.djpk.kemenkeu.go.id.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Februari 2019 sampai dengan Bulan Agustus 2019.